



LEMBAGA STUDI KEBIJAKAN PUBLIK
INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY STUDIES

Kompleks Maizionet Jalan Bougenville Raya No 9 Kel. Paropo Kec. Panakukang
Telp: 0411- 420581 Fax: 0411 458527 Handphone: 0821-9156-6770
Email : lskp.office@gmail.com / Website: www.lskp.or.id

RILIS MEDIA

HASIL PEMANTAUAN (MASA PEMUNGUTAN SUARA)

LEMBAGA STUDI KEBIJAKAN PUBLIK

Makassar, 14 Februari 2024

Salam Demokrasi Substantif,

Hasil pemantauan hari pemungutan suara ini mencerminkan dedikasi kami dalam memastikan setiap proses tahapan Pemilu 2024 memenuhi prinsip demokrasi yang substantif. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses Pemilu 2024, lembaga penyelenggara, partai politik, organisasi pendukung kandidat presiden dan wakil presiden, media, pihak keamanan, pemerintah, lembaga pemantau dan seluruh warga yang telah berkontribusi dalam menjaga integritas proses demokrasi dan kondisi aman sampai pada tahapan ini.

Secara umum, kami menilai proses pemungutan suara pemilu di Sulawesi Selatan banyak kekecewaan. Itu disebabkan masih ada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang kurang surat suaranya seperti di TPS khusus Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dan Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar. Selain itu, TPS khusus lainnya di Sekolah Luar Biasa-A YAPTI Ujung Pandang Baru masih menemui beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan teknisnya, seperti pembukaan TPS yang tidak sesuai jadwal karena distribusi kertas suara yang lambat, profesionalisme KPPS yang meninggalkan lokasi TPS, pemahaman akan aturan teknis di TPS masih minim terlihat dari intervensi sejumlah pihak dan TPS yang dipenuhi oleh oknum yang tidak berkepentingan, seperti anak-anak. Ditambah lagi, tidak ditemukan TPS khusus di 4 (empat) Rumah Sakit termasuk TPS untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Melalui pemantauan ini, kami berharap dapat memberikan masukan konstruktif kepada pihak terkait untuk meningkatkan proses pemilu di masa depan. Kami juga ingin menegaskan komitmen kami dalam memastikan pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk penyelewengan atau pelanggaran.

Berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan kami melaporkan bahwa:

1. Penyelenggaraan pemungutan suara telah berjalan baik. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang ikut menyukseskan penyelenggaraan ini. Namun catatan soal jadwal pembukaan TPS. Hanya 68,8% TPS di Sul-Sel yang buka tepat waktu. Sedangkan, hanya 31,3% TPS tidak dimulai tepat pukul 07.00. TPS 021 Caile, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba membuka kotak suara pada pukul 08.00. Hal ini karena keterlambatan logistik dan petugas KPPS yang terlihat kurang sigap dan efisien. Dampaknya juga pada molornya penutupan TPS yang melewati pukul 13.00 WITA yang terjadi di 58,8% dari lokasi TPS pemantauan. Serta, 64,7% yang perhitungan suaranya ditunda cukup lama setelah pemungutan suara.
2. Dalam hal pemilihan TPS, masih banyak yang tidak ramah kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Dari hasil pemantauan, 43,8% TPS lokasi pemantauan di Sulsel memiliki disabilitas yang terdiri atas tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tunagrahita dan lansia. Belum ditemukan penggunaan alat bantu untuk disabilitas,



utamanya tunanetra sensorik yang menggunakan hak pilihnya, utamanya Sekolah Luar Biasa-A YAPTI Ujung Pandang Baru. Bantuan yang diberikan hanya sebatas pada bilik yang lebih rendah untuk tunadaksa. Serta, pemberian pendamping dari keluarga dan orang yang diminta, bahkan tanpa menggunakan surat. Hal ini memberikan indikasi intervensi atas hak memilih setiap orang yang rahasia dan bebas tanpa tekanan.

3. Atribut dan suara teriakan kampanye untuk mengarahkan pilihan kepada salah satu paslon masih beredar di sekitar TPS. Hal ini dalam wujud saksi yang memberikan arahan untuk memilih salah satu pasangan calon dan partai politik tertentu di lokasi TPS. Juga, oknum yang tidak berkepentingan sebagai penyelenggara masih diberi akses untuk tetap di dalam TPS yang cenderung memberikan pengaruh.
4. Informasi pindah memilih yang kurang efektif. Hal ini menyebabkan salah seorang di TPS 012 SLB-A YAPTI Ujung Pandang Baru tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena belum tahu kalau DPTnya sudah pindah. Bahkan 25% pemilih di tolak untuk memilih karena sudah pindah domisili dan ada juga yang berasal dari luar daerah.
5. Antrian dan pencatatan administrasi pemilih yang tidak efektif dan efisien. Hasil pemantauan di TPS 011 dan 012 Ujung Pandang Baru, warga datang mengumpulkan surat pemberitahuan/undangan dengan tujuan mendapatkan nomor antrian lebih cepat. Tetapi, setelah menyetorkan, mereka meninggalkan TPS. Sehingga, ketika telah ditandai pada DPT dan mendapatkan nomor antrian, mereka tidak ditempatkan.
6. Pengusaha memberikan izin kepada karyawannya untuk memilih. Dari pemantauan, ada 31,6% pemilih yang ditolak untuk memilih di TPS. Sedangkan 52,6% tidak ditolak.
7. Partisipasi masyarakat yang masih perlu dioptimalkan. Hasil pemantau memperlihatkan kisaran 70-80an surat suara yang tidak digunakan. Bahkan, setelah proses perhitungan suara terdapat 23,5% lokasi pemantauan yang selisih dari jumlah surat suara awal yang diterima dan yang digunakan. TPS 013 Bontoala, Pallangga, Gowa. Terjadi perbedaan jumlah antara data daftar hadir pemilih dan jumlah suara. Sehingga KPPS menghitung dan mengecek kembali daftar hadir.

Untuk mendorong pelaksanaan Pemilu 2024 lebih demokratis dan akuntabel, maka kami rekomendasikan beberapa hal berikut:

1. Pemilihan TPS harus memiliki ruang yang ramah bagi semua. Sehingga masyarakat dapat memenuhi hak politiknya dengan baik.
2. Semua peserta Pemilu untuk menghormati masa pemungutan suara dengan tidak melakukan aktivitas kampanye di sekitar TPS.
3. Perlu upaya peningkatan kapasitas Petugas KPPS sehingga dapat melakukan tugasnya secara profesional.
4. KPU harus konsisten menerapkan standar operasional dalam distribusi logistik pemilu secara lengkap untuk memastikan semua TPS menerima logistik sesuai Standar, khususnya di wilayah pegunungan dan kepulauan.
5. Masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam memastikan penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan dengan damai, akuntabel, dan demokratis.
6. Masyarakat perlu meningkatkan pemahamannya tentang pemilu dengan di antaranya mempelajari rekam jejak semua kandidat dan menolak politik uang.
7. Mengajak seluruh pihak untuk menunggu hasil resmi pemilu dari Komisi Pemilihan Umum.



**LEMBAGA STUDI KEBIJAKAN PUBLIK
INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY STUDIES**

Kompleks Maizionet Jalan Bougenvile Raya No 9 Kel. Paropo Kec. Panakukang
Telp: 0411- 420581 Fax: 0411 458527 Handphone: 0821-9156-6770
Email : lskp.office@gmail.com / Website: www.lskp.or.id

8. Masyarakat terus menjaga persatuan pasca pemilu, dan sama-sama berupaya membangun negara kea rah yang lebih baik.

Untuk itu kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga semangat demokrasi, menghormati hasil pemilu nantinya, dan bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi negara kita.

Terima kasih.

Salma Tadjang (Manajer Program LSKP), M. Kafrawy Saenong (Koordinator Pemantau LSKP), Alfiana (Koordinator Teknis Pemantau LSKP), Laylah Fi Amanillah (Koordinator Teknis Pemantau LSKP).